

ABSTRAK

Visa merupakan salah satu syarat bagi setiap Warga Negara Asing untuk masuk Wilayah Indonesia. Kebijakan Bebas Visa menjadi sesuatu yang cukup penting bagi Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal ini terlihat dari ditetapkannya kebijakan bebas visa hingga dua kali. Presiden Joko Widodo memberlakukan beberapa kebijakan yang mengatur tentang pemberian fasilitas bebas visa kunjungan ke beberapa negara. Ada dua tahap pemberlakuan pemberian fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) yang ditetapkan. Tahap pertama, Perpres No. 69/2015 tentang Bebas Visa Kunjungan yang ditandatangani Presiden pada 9 Juni 2015. Ada 30 negara yang mendapatkan fasilitas BVKS. Tahap kedua mulai diberlakukan dengan ditandatanganinya Perpres No. 104/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 69/2015. Skripsi ini akan membahas tentang latar belakang Presiden Joko Widodo menetapkan kebijakan bebas visa pada tahun 2015 dikaji berdasarkan sudut pandang politik luar negeri.

Kata Kunci: Bebas Visa, Joko Widodo, Perpres

ABSTRACT

Visa is one of the requirements for each citizen foreign to entrance this country. Policy of free visa into something that important for the government of President Joko Widodo. We can look at from the establishment of free visa policy to twice. There are two stage the implementation of the facility of free visa that are set up. The first phase is The Presidential Decree no. 69 / 2015 about of free visa signing by President on June 9 2015. There are 30 states get facilitation fo free visa. The second phase issued by the signing of a Presidential Decree no. 104 / 2015 about the amendment on the regulation president no. 69 / 2015. Thesis this will examine the background of the of the President Joko Widodo set a policy of free visa in 2015 through foreign policy concept.

Keywords: Free Visa, President Joko Widodo, Presidential Decree